

Implikasi Konflik Iran-Israel bagi Kebijakan Pertahanan Indonesia (Sebuah Refleksi Historis dari Pembelajaran Perang Diponegoro untuk Ketahanan Nasional)

Nugroho Sulistyoto Budi ^{1*}, Edmund Gultom², dan Joni Widjayanto²

¹⁻³ Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia

Korespondensi: * nsbudi67@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.468> | halaman: 405 – 421

Dikirim: 10-10-2025 | Diterima: 29-10-2025 | Dipublikasikan: 30-11-2025

Abstrak

Konflik antara Iran dan Israel merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks terhadap stabilitas perekonomian dunia. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis bagaimana konflik Iran-Israel berimplikasi pada kebijakan luar negeri Indonesia. Metode Systematic Literature Review (SLR) dan Discourse Network Analysis (DNA) digunakan untuk menganalisis implikasi konflik Iran-Israel terhadap kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional Indonesia. Proses systematic literature review (SLR) mengikuti kerangka PRISMA (2020) yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu identification, screening, eligibility, dan included. Analisis wacana DNA menunjukkan adanya keterhubungan antara aktor-aktor utama dan konsep kunci dalam konflik Iran-Israel. Aktor dibedakan menjadi aktor institusional (Pemerintah Indonesia, Pemerintah Iran, Pemerintah Amerika Serikat dan Sekutu Barat, serta Pemerintah Israel) dan aktor non-pemerintah (organisasi internasional, media, dan pelaku ekonomi/finansial). Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik antara Iran dan Israel menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan ideologi-sosial Indonesia. Melalui refleksi historis terhadap Perang Diponegoro, penelitian ini menjadi cerminan agar Indonesia menjaga kemandirian dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan strategi ketahanan nasional. Upaya diplomasi preventif, diversifikasi strategis, transisi energi berkelanjutan, dan penguatan diplomasi digital, menjadi peluang untuk mentransformasi perannya sebagai middle power menjadi kekuatan regional yang lebih berpengaruh. Studi ini merekomendasikan agar Indonesia memperkuat diversifikasi energi, mengembangkan diplomasi multilateral yang adaptif, serta memanfaatkan soft power dan digital diplomacy untuk memperkuat peran sebagai middle power yang aktif, independen, dan konstruktif dalam menjaga perdamaian global serta melindungi kepentingan nasional di tengah ketegangan geopolitik Iran-Israel.

Kata kunci: Konflik Iran-Israel; Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Ketahanan Nasional.

I. Pendahuluan

Konflik antara Iran dan Israel merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks dan persisten di kawasan Timur Tengah. Akar permusuhan keduanya dapat ditelusuri sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang menggulingkan rezim Shah yang pro-Barat dan memunculkan pemerintahan teokratis yang memandang Israel sebagai entitas “ilegitim” di kawasan. Sejak saat itu, hubungan yang sebelumnya netral bahkan cenderung pragmatis berubah menjadi permusuhan terbuka yang sarat dengan ideologi, politik, dan kepentingan strategis (Roshandel & Lean, 2011). Konflik ini semakin diperuncing oleh keterlibatan Iran dalam mendukung aktor non-negara seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, yang dipandang Israel sebagai ancaman eksistensial langsung (Parsi, 2007). Perkembangan konflik yang terjadi antara Iran dan Israel secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Timeline Konflik Iran-Israel

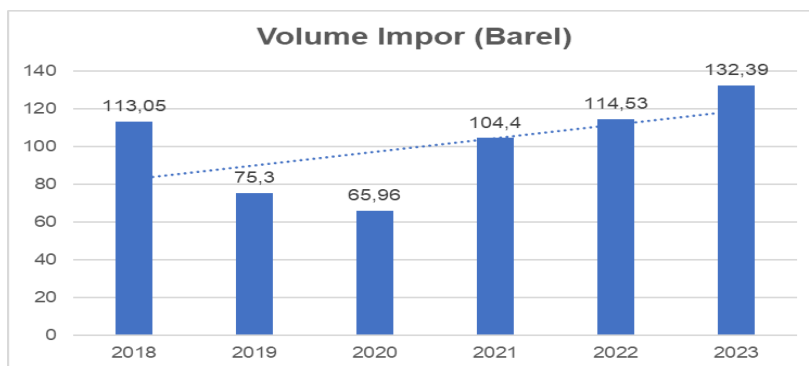
Sumber : Diolah peneliti

Gambar 1 memperlihatkan perkembangan konflik Iran-Israel sejak 1979 hingga 2024 yang mempresentasikan perubahan hubungan kedua negara dari sekadar permusuhan diplomatik menuju rivalitas militer terbuka. Pada tahap awal, revolusi Islam 1979 menjadi titik balik karena Iran tidak hanya memutuskan hubungan dengan Israel tetapi juga mengubah posisinya dari negara yang sebelumnya menjalin kerja sama pragmatis dengan Tel Aviv menjadi salah satu aktor utama penentang eksistensi Israel di Timur Tengah. Periode 1980-an ditandai dengan keterlibatan Iran dalam mendukung Hizbullah di Lebanon, yang menandai pergeseran strategi dari konflik antarnegara ke *proxy war* melalui non-negara. Tuduhan keterlibatan Iran dalam pengeboman Buenos Aires 1994 kemudian menunjukkan dimensi transnasional konflik, di mana perseteruan tidak hanya terbatas pada kawasan Timur Tengah, melainkan menjalar hingga Amerika Latin.

Memasuki abad ke-21, eskalasi konflik mengalami diversifikasi bentuk. Perang Lebanon 2006 memperlihatkan kemampuan Hizbullah yang diperkuat oleh Iran untuk menantang superioritas militer Israel. Sementara itu, serangan siber Stuxnet pada 2010 terhadap fasilitas nuklir Iran mencerminkan bahwa persaingan tidak lagi terbatas pada dimensi konvensional, melainkan meluas ke ranah teknologi dan keamanan siber. Pada 2018, Israel secara terbuka melakukan operasi militer terhadap basis Iran di Suriah, mempertegas keterlibatan langsung dalam arena regional. Ketegangan kembali meningkat pada 2021 dengan serangan terhadap tanker di Teluk dan Laut Merah yang menunjukkan kerentanan jalur perdagangan energi global. Puncaknya, pada 2024 Iran meluncurkan serangan drone skala besar terhadap Israel, menandai fase baru dalam konfrontasi militer yang lebih terbuka dan berpotensi menyeret kekuatan global.

Dampak dari konflik ini sangat signifikan terhadap stabilitas kawasan dan dunia. Pertama, dari sisi energi, kawasan Timur Tengah adalah pemasok utama minyak dunia. Setiap eskalasi ketegangan, misalnya serangan terhadap fasilitas minyak di Teluk, dapat mengganggu pasokan global dan memicu lonjakan harga energi internasional. Kedua, dari sisi keamanan maritim, Selat Hormuz yang berada dalam pengaruh Iran merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia; gangguan di wilayah ini akan berdampak langsung pada rantai pasok global (Roomi, 2023). Ketiga, dari sisi perdagangan internasional, ketidakstabilan kawasan mempengaruhi kepercayaan investor, meningkatkan biaya asuransi pelayaran, serta menciptakan ketidakpastian dalam jaringan distribusi global yang sangat tergantung pada stabilitas jalur energi dan perdagangan di Timur Tengah. Selain itu, konflik Iran–Israel juga mencerminkan dimensi ideologis yang kuat, di mana rivalitas tidak hanya menyangkut kepentingan keamanan atau ekonomi, tetapi juga identitas politik dan religius. Menurut Roomi (2023), konflik ini dapat dipahami sebagai *“ultra-ideological conflict”* yang menjadikannya sulit untuk diselesaikan melalui mekanisme diplomasi konvensional. Hal ini menambah lapisan kompleksitas yang mempengaruhi strategi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional.

Konflik Iran–Israel memiliki implikasi signifikan bagi Indonesia meskipun negara ini tidak terlibat langsung. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan nasional. Salah satu faktor utama adalah ketergantungan energi. Indonesia masih mengimpor sebagian besar minyak mentah dari kawasan Timur Tengah, sehingga eskalasi konflik yang mengancam jalur vital Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga energi domestik dan melemahkan stabilitas ekonomi (Lituhayu et al., 2024). Hal ini diperkuat oleh data dari Kementerian ESDM yang menunjukkan grafik impor minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut :



Gambar 2. Grafik Impor Minyak Mentah Tahun 2018–2023

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Visualisasi data ini menggambarkan fluktuasi volume impor minyak mentah Indonesia. Terlihat penurunan signifikan pada tahun 2020 yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi, diikuti dengan lonjakan kembali yang menunjukkan pemulihan ekonomi dan peningkatan kebutuhan energi domestik. Selain energi, jalur perdagangan internasional Indonesia juga sangat bergantung pada keamanan maritim global. Ketegangan di Teluk Persia dapat mengganggu distribusi barang dan meningkatkan biaya logistik ekspor-impor. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap dinamika geopolitik global. Dalam ranah diplomasi, prinsip politik luar negeri bebas-aktif menuntut Indonesia untuk menyeimbangkan

sikap menolak agresi dan mendukung perdamaian dengan kepentingan pragmatis menjaga hubungan ekonomi dengan mitra global, baik Barat maupun Timur. Indrawan & Yuliandri (2025) menekankan bahwa konflik ini berpotensi menjadi pemicu ketidakstabilan global yang menyerupai Perang Dunia III, sehingga Indonesia tidak dapat bersikap netral sepenuhnya.

Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi dilema strategis yang menuntut respons kebijakan luar negeri yang adaptif dan terukur. Di satu sisi, Indonesia memiliki komitmen historis terhadap isu Palestina dan solidaritas dengan dunia Islam, yang menjadikannya sulit untuk bersikap netral dalam konflik yang melibatkan Israel (Mudore, 2019). Namun, di sisi lain, Indonesia juga harus menjaga kepentingan ekonomi dan hubungan diplomatik dengan mitra strategis global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Uni Eropa yang memiliki posisi berbeda terhadap Iran maupun Israel. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Iran–Israel bukan sekadar isu eksternal, tetapi berimplikasi langsung pada kepentingan nasional Indonesia, baik dalam aspek energi, perdagangan, maupun diplomasi (Hakiem, Putri, & Gustianti, 2023). Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk memainkan peran aktif dalam forum multilateral seperti PBB, G20, ASEAN, dan OKI guna mendorong de-eskalasi konflik sekaligus memastikan perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya.

Konflik Iran-Israel juga memberikan implikasi mendalam terhadap ketahanan nasional Indonesia melalui tiga dimensi kritis: ekonomi, keamanan, dan ideologi-sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2024) yang menganalisis saham PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk, menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel menciptakan volatilitas pasar energi yang berdampak langsung pada sektor energi Indonesia. Di sisi lain pada aspek keamanan nasional terkena dampak dari konflik ini, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Koloay et al. (2024) yang menegaskan bahwa konflik Israel-Iran memiliki dampak signifikan terhadap keamanan kawasan regional dan global, khususnya melalui ancaman terhadap jalur perdagangan strategis. Kompleksitas inilah yang menuntut Indonesia untuk mengembangkan strategi ketahanan nasional yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, keamanan, dan sosial-politik dalam menghadapi dinamika konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Memahami kompleksitas konflik Iran–Israel dan implikasinya bagi Indonesia memerlukan refleksi historis dari pengalaman bangsa sendiri. Perang Diponegoro (1825–1830) menjadi cermin penting karena bukan hanya perlawanan militer, melainkan konflik multidimensi yang melibatkan ideologi, sosial, dan ekonomi. Perang ini menunjukkan bagaimana strategi asimetris melalui taktik gerilya, dukungan rakyat, dan legitimasi ideologis yang dapat menentang kekuatan kolonial yang lebih unggul. Strategi serupa terlihat dalam pendekatan Iran yang memanfaatkan aktor non-negara seperti Hizbullah dan Hamas untuk mengimbangi keunggulan militer Israel. Dampak Perang Diponegoro juga menegaskan betapa konflik berkepanjangan merusak pondasi ekonomi dan sosial masyarakat Jawa, mulai dari terganggunya pertanian hingga melemahnya perdagangan (Tjahjaulan & Paramita, 2017). Hal ini paralel dengan konsekuensi konflik Iran–Israel yang mengganggu jalur perdagangan global, memicu lonjakan harga energi, dan menimbulkan instabilitas kawasan. Bagi Indonesia, pembelajaran ini menekankan pentingnya antisipasi terhadap dampak eksternal pada ketahanan energi dan keamanan maritim. Akhir Perang Diponegoro melalui tipu daya diplomatik yang berujung pada penangkapan sang pemimpin juga memberi pelajaran bahwa diplomasi dalam konflik asimetris sering kali sarat ketidakpercayaan. Situasi ini serupa dengan tantangan diplomasi Iran–Israel yang dipengaruhi kepentingan kekuatan besar dan minim kepercayaan antar pihak. Refleksi historis ini memperkuat sikap Indonesia untuk menyeimbangkan komitmen moral terhadap keadilan internasional dengan

kebutuhan pragmatis menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan diplomatik global melalui forum multilateral.

Meskipun konflik Iran-Israel telah menjadi subjek kajian yang luas, sebagian besar literatur berfokus pada dinamika regional, peran aktor non-negara, atau strategi kekuatan besar. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Roomi (2023) yang menganalisis konflik ini sebagai "*ultra-ideological conflict*" yang sulit diselesaikan, sementara studi Ali, Kousar, & Ahmed (2025) membahas keterlibatan kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Tiongkok yang mengubahnya menjadi kontestasi kekuatan global. Namun, masih sedikit riset yang secara spesifik dan komprehensif mengkaji implikasi langsung konflik ini terhadap kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional Indonesia. Literatur yang ada cenderung menyentuh isu ini secara parsial, tanpa memberikan analisis terintegrasi antara dimensi geopolitik global dengan respons kebijakan domestik. Kesenjangan ini menciptakan urgensi akademis untuk mengisi kekosongan literatur, terutama dalam konteks di mana Indonesia menghadapi tantangan nyata terhadap stabilitas ekonomi dan geopolitiknya. Studi ini memberikan pemahaman holistik yang dapat mendukung perumusan kebijakan luar negeri yang lebih adaptif dan strategi ketahanan nasional yang proaktif. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis bagaimana konflik Iran-Israel berimplikasi pada kebijakan luar negeri Indonesia.

II. Metode

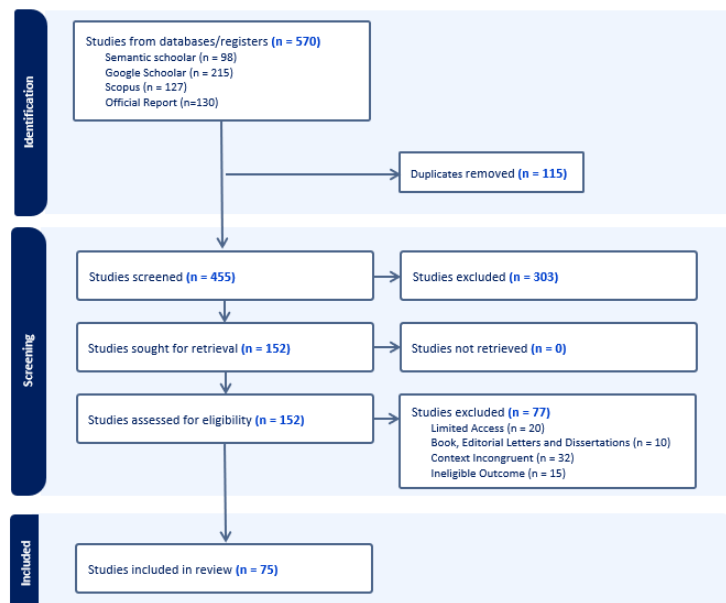
Artikel ini menggunakan kombinasi metode *Systematic Literature Review* (SLR) dan *Discourse Network Analysis* (DNA) untuk menganalisis implikasi konflik Iran-Israel terhadap kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif sekaligus analisis yang lebih mendalam mengenai dinamika wacana akademik dan kebijakan terkait isu geopolitik global. Pendekatan SLR dalam penelitian ini memberikan panduan komprehensif untuk melakukan tinjauan sistematis yang transparan dan dapat direproduksi (Page et al., 2021). Dalam penelitian ini, SLR digunakan untuk menelaah jurnal akademik, laporan kebijakan, serta publikasi internasional yang membahas konflik Iran-Israel, ketahanan energi, keamanan maritim, serta implikasinya bagi negara-negara non-pihak seperti Indonesia. Melalui pendekatan ini, artikel dapat memetakan kesenjangan literatur, mengidentifikasi pola penelitian terdahulu, serta menegaskan urgensi kajian terhadap konteks Indonesia. Proses SLR dalam penelitian ini mengikuti enam tahap metodologis yang telah tervalidasi: informasi latar belakang, strategi pencarian, penyaringan dan seleksi, ekstraksi data, sintesis data, dan komentar pihak eksternal (Zawacki-Richter et al., 2020). Proses ini tidak hanya memetakan dinamika konflik secara historis, tetapi juga menyoroti implikasi langsung bagi negara seperti Indonesia, termasuk keterkaitannya dengan isu energi, diplomasi, dan ketahanan nasional. Melalui pendekatan ini, artikel dapat memetakan kesenjangan literatur, mengidentifikasi pola penelitian terdahulu, serta menegaskan urgensi kajian terhadap konteks Indonesia dalam dinamika geopolitik Timur Tengah.

Sedangkan DNA dalam penelitian ini, membantu mengidentifikasi jaringan wacana yang terbentuk di tingkat global maupun domestik mengenai konflik Iran-Israel, serta bagaimana wacana tersebut memengaruhi posisi dan strategi Indonesia dalam forum internasional. Metodologi ini sangat relevan untuk analisis kebijakan luar negeri karena memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana narasi dan representasi diskursif membentuk preferensi kebijakan dan tindakan diplomatik (Van Dijk, 2014). Melalui DNA, penelitian ini dapat memetakan bagaimana posisi Indonesia dibentuk oleh interaksi wacana internasional, misalnya

forum PBB, G20, ASEAN, serta bagaimana diskursus domestik, seperti solidaritas terhadap Palestina dan kepentingan energi nasional, mempengaruhi respons diplomatik. Selain itu, untuk memperkuat validitas, penelitian ini mengadopsi prinsip triangulasi sumber dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal internasional, laporan lembaga penelitian, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi kebijakan energi Indonesia. Pendekatan triangulasi penting untuk mengurangi bias interpretatif sekaligus meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Dengan kombinasi SLR dan DNA yang diperkuat melalui triangulasi, penelitian ini tidak hanya menghasilkan peta literatur yang sistematis, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana konflik Iran-Israel dipersepsikan dan direspons oleh Indonesia dalam konteks kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional.

III. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, proses *systematic literature review* (SLR) mengikuti kerangka PRISMA 2020 yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Keempat tahapan tersebut digunakan untuk menyeleksi dokumen secara sistematis sehingga hanya sumber yang relevan dengan tema konflik Iran Israel, kebijakan luar negeri Indonesia, serta ketahanan nasional yang dimasukkan dalam analisis. Dengan metode tersebut, alur seleksi literatur dapat dijelaskan secara transparan dan hasil yang diperoleh lebih terfokus pada tujuan penelitian. Berikut visualisasi kerangka prisma:



Gambar 3. PRISMA Framework

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Pada tahap identifikasi, peneliti menghimpun 570 dokumen yang berasal dari berbagai basis data di Scopus, Google Scholar, Semantic Scholar, prosiding, serta wacana

berita daring. Setelah dilakukan proses reduplikasi untuk menghapus dokumen ganda, jumlahnya berkurang menjadi 455 dokumen.

Tahap berikutnya adalah *screening*, yaitu penyaringan berdasarkan judul dan abstrak (atau ringkasan berita). Pada proses ini, dokumen yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi, misalnya tidak secara langsung membahas konflik Iran dan Israel atau tidak relevan dengan kebijakan luar negeri Indonesia akan dikeluarkan. Dari total 455 dokumen, hanya 152 dokumen yang lolos tahap penyaringan ini. Selanjutnya, pada tahap *eligibility*, dilakukan pembacaan teks penuh (*full-text reading*) untuk menilai kesesuaian substansi setiap dokumen. Dari 152 dokumen yang diperiksa, sebanyak 75 dokumen dinilai tidak memenuhi kriteria karena hanya berupa opini singkat tanpa analisis mendalam atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Dengan demikian, jumlah dokumen yang tersisa adalah 75 dokumen. Tahap terakhir adalah *included*, yaitu memasukkan dokumen yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai bahan analisis utama. Pada penelitian ini, sebanyak 31 dokumen merupakan artikel akademik yang dianalisis dengan pendekatan SLR, sedangkan 44 dokumen berupa wacana berita yang selanjutnya digunakan dalam analisis *Discourse Network Analysis* (DNA). Kedua kelompok sumber ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi konflik Iran-Israel terhadap kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional Indonesia.

a. Analisis Peran dan Posisi Indonesia dalam Dinamika Geopolitik Konflik Iran-Israel

Konflik Iran-Israel menjadi ajang perebutan pengaruh kekuasaan global, yaitu kubu Amerika Serikat dan Sekutu Barat dengan kubu Timur Tengah. Kedua kubu ini memiliki kepentingan yang saling bersinggungan di kawasan Timur Tengah. Israel yang dianggap menjadi kubu Amerika Serikat dan Sekutu Barat akan memberi dukungan secara militer, finansial, dan hubungan diplomatik negara lain. Sebaliknya, Iran yang mendapat dukungan dari negara anti-barat dan negara yang berada di lingkaran perlawanan. Dukungan yang diberikan pada Iran berupa militer, finansial dan kepentingan geopolitik. Persaingan antar dua kubu ini berdampak pada kebijakan dan kondisi sosial, ekonomi, politik di negara-negara lainnya. Hampir seluruh negara yang tidak ikut campur dengan konflik Iran-Israel juga akan terkena imbasnya. Konflik Iran-Israel bukan lagi menjadi konflik regional, tetapi sudah menjadi konflik global.

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga membuat Indonesia sering dipandang sebagai kekuatan menengah (*middle power*) dalam politik global. Konsep *middle power* Indonesia bukan hanya soal jumlah penduduk, kekuatan ekonomi, atau militer, tetapi juga soal peran diplomasi: menjadi mediator konflik, membangun kesepakatan di forum internasional, dan mendorong tata kelola global yang lebih inklusif. Hal ini sejalan dengan kajian yang dikemukakan oleh Prasetya et al. (2025), peran *middle power* Indonesia punya akar historis dari politik luar negeri “bebas-aktif” sejak masa Soekarno. Artinya, Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan besar mana pun, tetapi tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi konflik Iran-Israel, Indonesia menghadapi dilema klasik *middle power* yaitu menjaga prinsip sekaligus memenuhi kepentingan praktis. Di satu sisi, Indonesia mempunyai komitmen moral dan historis yang kuat pada isu Palestina, terlebih lagi sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus memperhitungkan kepentingan ekonominya yang berhubungan erat dengan stabilitas Timur Tengah, jalur perdagangan dunia, dan hubungan dengan negara-negara besar yang mempunyai pandangan berbeda mengenai konflik ini.



Gambar 2. Analisis Wacana Konflik Iran–Israel dan Posisi Indonesia melalui DNA

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Berdasarkan analisis wacana DNA, dapat dilihat keterhubungan antara aktor-aktor utama dan konsep kunci dalam konflik Iran–Israel. Aktor dibedakan menjadi aktor institusional yang merupakan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Iran, Pemerintah Amerika Serikat dan Sekutu Barat, serta Pemerintah Israel yang berada di sebelah kanan. Aktor non-pemerintah yang berada di sebelah kiri terdiri dari organisasi internasional, media, dan pelaku ekonomi/finansial. Konsep kunci yang dianalisis terdiri dari: (1) Agresi militer dan respons internasional; (2) Keamanan regional Timur Tengah; (3) Peran aktor global; (4) Hak asasi manusia dan korban sipil; (5) Propaganda dan media framing Perang; (6) Dampak ekonomi global; dan (7) Ketidakstabilan kebijakan pemerintah.

Jaringan tersebut menunjukkan bahwa Peran Aktor Global dan Keamanan Regional Timur Tengah menjadi konsep paling banyak dihubungkan oleh berbagai aktor, terutama Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat & Sekutu Barat, Pemerintah Iran, dan Organisasi Internasional. Isu konflik Iran–Israel menjadi arena kontestasi geopolitik global. Pemerintah AS dan sekutu Barat memiliki koneksi kuat dengan “Agresi Militer dan Respons Internasional” serta “Keamanan Regional Timur Tengah.” Warna biru pada relasi ini menunjukkan dominasi isu keamanan dan legitimasi tindakan militer. AS dan sekutunya cenderung membingkai konflik sebagai bagian dari agenda keamanan global, bukan sekadar isu bilateral.

Pemerintah Iran berelasi dengan “Hak Asasi Manusia dan Korban Sipil” serta “Agresi Militer,” yang menunjukkan upaya membingkai diri sebagai pihak yang “melawan penindasan.” Sedangkan Pemerintah Israel lebih banyak terhubung dengan “Propaganda dan Media Framing” serta “Keamanan Regional,” yang memperlihatkan penggunaan narasi pertahanan diri dan ancaman eksistensial. Garis merah yang menghubungkan Iran–Israel melalui simpul “Peran Aktor Global” menunjukkan adanya pertarungan wacana yang tajam mengenai legitimasi dan representasi moral di mata dunia. Organisasi Internasional seperti PBB, NATO, dan OPEC terhubung dengan hampir semua konsep, terutama “Hak Asasi Manusia,” “Dampak Ekonomi Global,” dan “Agresi Militer.” Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga internasional berfungsi sebagai arena legitimasi di mana aktor-aktor mendapatkan dukungan moral dan politik. Media juga memperkuat “Propaganda dan Media Framing.” Melalui pemberitaan, framing konflik menjadi arena kompetisi makna yang menentukan persepsi publik.

Keterhubungan Pelaku Ekonomi/Finansial dengan “Dampak Ekonomi Global” dan “Ketidakstabilan Kebijakan Pemerintah” memperlihatkan bahwa perang bukan hanya isu politik, tetapi juga krisis ekonomi. Kenaikan harga minyak dunia, gangguan rantai pasok, dan tekanan

terhadap nilai tukar menjadi dampak nyata bagi negara-negara non-konflik seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia terhubung dengan berbagai konsep, terutama “Peran Aktor Global,” “Dampak Ekonomi Global,” serta “Ketidakstabilan Kebijakan Pemerintah.” Hubungan ini menunjukkan bahwa Indonesia memposisikan diri sebagai *middle power* yang berupaya menyeimbangkan peran moral dan pragmatis. Di satu sisi, Indonesia menyoroti aspek kemanusiaan dan hukum internasional, tetapi di sisi lain harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan energi domestik akibat ketegangan di Timur Tengah. Relasi dengan “Ketidakstabilan Kebijakan Pemerintah” juga menggambarkan dinamika politik domestik: tekanan publik agar Indonesia bersikap lebih tegas terhadap Israel berhadapan dengan kebutuhan menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan mitra ekonomi lainnya.

Pada praktiknya, terdapat tiga strategi utama yang ditempuh Indonesia. Pertama, aktif menggunakan forum multilateral seperti OKI, PBB, G20 untuk mendorong solusi damai sekaligus menolak pendekatan sepihak. Narasi yang dibangun berbeda-beda sesuai audiens dan dinamika masing-masing forum. Dalam forum PBB, Indonesia menekankan prinsip universal seperti hukum internasional, hak asasi manusia dan penyelesaian damai agar pesannya diterima secara luas. Misalnya, pada Juli 2025 Indonesia ikut menandatangani New York Declaration bersama Prancis dan Arab Saudi yang menyerukan penghentian operasi militer Israel di Gaza serta penarikan pasukan Israel. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum ke-80 juga menyatakan kesiapan mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian, seraya menegaskan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya mungkin apabila kedaulatan Palestina terlebih dahulu diakui. Sementara itu, dalam forum OKI, retorika Indonesia lebih emosional dan eksplisit, menekankan solidaritas Islam serta penggunaan terminologi religius dan moral. Pada pertemuan Juni 2025, misalnya Jakarta menekankan pentingnya de-eskalasi sekaligus mengkritik agresi Israel. Namun, sebagian pengamat menilai sikap tersebut masih “*not bold enough*” karena tidak mendukung klaim Iran untuk membela diri ataupun mengambil posisi konfrontatif. Kritik ini memperlihatkan adanya ekspektasi sebagian negara muslim agar Indonesia lebih keras dalam membela Palestina. Perbedaan gaya komunikasi di media forum bukanlah bentuk inkonsistensi, melainkan strategi adaptif. Universalisme lebih efektif di PBB untuk membangun dukungan lintas kawasan, sedangkan solidaritas Islam lebih resonan di OKI.

Selanjutnya strategi kedua, menjaga keseimbangan agar tidak terlihat terlalu berpihak. Indonesia memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan selalu mendukung Palestina, tetapi tetap menjaga komunikasi dengan Amerika Serikat (sekutu utama Israel) sekaligus mempererat hubungan ekonomi dengan Tiongkok (mitra strategis Iran). Strategi ketiga, memposisikan diri sebagai fasilitator dialog, bukan pihak yang terlibat langsung dalam konflik, agar tetap dipercaya semua pihak. Indonesia sebagai negara yang dianggap *middle power*, tentu tidak mudah dalam menentukan strateginya. Persaingan besar antara AS dan Tiongkok membuat ruang gerak *middle power* seperti Indonesia semakin sempit. Menurut Prasetya dkk. (2025), Indonesia semakin sering mendapat tekanan untuk “memilih pihak”, termasuk dalam konflik Timur Tengah yang kini semakin terbelah antara blok pro-Israel dan blok penentangannya. Selain itu, terdapat keterbatasan dari sisi dalam negeri. Walaupun Indonesia ingin berperan lebih besar di dunia, fokus utama pemerintah tetap pada pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan. Artinya, sumber daya untuk diplomasi global terbatas. Dalam kasus konflik Iran–Israel, Indonesia secara lantang mendukung solusi damai dan tetap memberikan kontribusinya secara nyata misalnya sebagai mediator aktif, pemberi bantuan besar, atau mengirim pasukan perdamaian.

Selain faktor eksternal, dinamika politik domestik juga sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Dukungan publik yang besar terhadap Palestina menciptakan tekanan

internal agar pemerintah mengambil sikap lebih tegas menentang Israel. Posisi ini kadang dipersepsikan sebagai dukungan tidak langsung terhadap Iran, mengingat peran Teheran dalam mendukung kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Namun, pemerintah juga harus memperhitungkan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional yang menuntut hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya. Akibatnya, Indonesia sering kali menempuh jalan tengah: memilih sikap yang fleksibel, bahkan ambigu, yang memungkinkan ruang manuver diplomasi lebih luas, tetapi sekaligus berisiko dianggap tidak konsisten atau kurang tegas.

b. Dampak Implikasi Konflik terhadap Dimensi Ketahanan Nasional Indonesia

Konflik antara Iran dan Israel menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas keuangan di Indonesia melalui mekanisme transmisi harga energi global. Sebagai negara net importer minyak, dengan volume impor mencapai 132,39 juta barel pada tahun 2023, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap fluktuasi harga energi yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik yang berpotensi menyebabkan penutupan Selat Hormuz sebagai jalur strategis yang menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, hal ini dapat memicu lonjakan tajam harga minyak mentah internasional (Lituhayu et al., 2024). Dampak langsung dari kenaikan harga energi global ini terlihat pada tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada pos subsidi energi yang telah membengkak dalam beberapa tahun terakhir.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja subsidi energi tahun 2024 mencapai Rp177,62 triliun, meningkat 8,1% dari tahun sebelumnya, dan diproyeksikan naik menjadi Rp203,4 triliun pada tahun 2025 (Kemenkeu, 2024). Peningkatan ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah untuk melepaskan diri dari beban subsidi akibat ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar USD 1 per barel dapat menambah beban APBN hingga ratusan miliar rupiah, tergantung pada volume konsumsi dan nilai tukar rupiah. Implikasi lebih lanjut dari ketidakstabilan harga energi adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Indonesia harus menggunakan cadangan devisa untuk membiayai impor energi yang semakin mahal. Pelemahan rupiah akan memperburuk kondisi fiskal karena meningkatkan nilai riil subsidi dalam mata uang domestik, menciptakan spiral negatif yang menggerus daya beli masyarakat dan stabilitas makroekonomi.

Fluktuasi harga energi global akibat konflik Iran–Israel tidak hanya menekan fiskal pemerintah, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat melalui peningkatan inflasi. Kenaikan harga minyak mentah dunia secara langsung mempengaruhi harga BBM domestik, baik bersubsidi maupun non-subsidi yang kemudian mendorong kenaikan biaya transportasi dan logistik. Sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada sektor transportasi, kondisi ini menyebabkan lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan memicu tekanan inflasi yang sulit dikendalikan. Dampak inflasi tersebut paling dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah, karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan transportasi. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2024) menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM sebesar 10% dapat meningkatkan inflasi umum sebesar 0,5–1%, dengan pengaruh lebih kuat terhadap inflasi inti yang bersifat jangka panjang. Selain itu, ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik mendorong perilaku spekulatif dan penimbunan barang, memperburuk tekanan harga di pasar.

Dalam menghadapi dampak fluktuasi harga energi global akibat konflik Iran–Israel, pemerintah Indonesia telah menempuh beberapa langkah mitigasi, meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Pertama, subsidi energi yang tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga

daya beli masyarakat. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 183,9 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan listrik (Kemenkeu, 2025). Namun, kebijakan ini menimbulkan dilema: subsidi diperlukan untuk melindungi masyarakat rentan, tetapi jika tidak tepat sasaran, justru membebani APBN dan menciptakan inefisiensi ekonomi. Langkah kedua yaitu dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan strategi bauran kebijakan (*policy mix*), seperti intervensi pasar valuta asing, pengelolaan likuiditas rupiah, dan koordinasi dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan ini terbatas dalam menghadapi inflasi yang bersumber dari kenaikan harga energi global, karena tekanan tersebut berasal dari sisi penawaran. Ketiga, pemerintah juga mendorong diversifikasi sumber energi sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dari Timur Tengah. Pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan biofuel telah menjadi prioritas, tetapi pelaksanaannya masih lambat karena keterbatasan investasi, regulasi yang belum selaras, serta infrastruktur yang belum memadai (Kementerian ESDM, 2024).

Konflik Iran-Israel yang terus memanas memberikan dampak signifikan terhadap pertahanan dan keamanan (hankam) Indonesia, khususnya dalam dimensi keamanan maritim. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas jalur perdagangan global, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi lintasan strategis perdagangan internasional. Situasi ini menuntut kesiapan maksimal TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan instansi terkait sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia di laut. TNI AL memiliki mandat konstitusional untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, mengamankan jalur perdagangan nasional, dan melindungi sumber daya maritim. Namun, kesiapan operasional dalam menghadapi ancaman yang bersumber dari konflik geopolitik global seperti Iran-Israel masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi alutsista, teknologi, maupun kapasitas personel (Rosny et al., 2024). Indonesia juga mengalami ancaman terorisme dan radikalisme yang dapat meningkat seiring sentimen keagamaan dan politik yang terpolarisasi akibat konflik, berpotensi memicu aksi-aksi ekstremisme di dalam negeri (BNPT, 2022). Selain itu, diplomasi dan posisi geopolitik Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar diuji dalam menyeimbangkan hubungan internasional tanpa terjebak dalam polarisasi konflik (Sukma, 2020). Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki ikatan emosional dan religius yang kuat dengan isu Palestina dan konflik di Timur Tengah secara umum. Polarisasi opini publik terkait konflik Iran-Israel sering kali termanifestasi dalam dua kubu yang saling bertentangan: kubu yang mendukung Palestina secara penuh dan mengecam keras Israel, serta kubu yang mengadvokasi pendekatan yang lebih moderat atau bahkan pro-normalisasi hubungan dengan Israel atas dasar pragmatisme ekonomi dan politik. Fenomena ini mencerminkan bagaimana isu eksternal dapat menggerus toleransi dan dialog konstruktif di dalam masyarakat Indonesia. Dampak polarisasi ini tidak hanya terbatas pada ranah wacana, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas politik domestik.

c. Refleksi Historis: Pembelajaran dari Perang Diponegoro bagi Ketahanan Nasional Indonesia

Konflik Iran-Israel memiliki sejumlah kesamaan dengan pengalaman Indonesia dalam Perang Diponegoro (1825-1830), terutama dalam hal strategi perlawanan non-konvensional. Perang Diponegoro menunjukkan bagaimana kekuatan yang secara militer lebih lemah dapat menggunakan strategi asimetris seperti gerilya, dukungan rakyat, dan jaringan santri untuk menghadapi dominasi kolonial Belanda (Carey, 2017). Strategi ini paralel dengan pendekatan Iran yang memanfaatkan aktor non-negara, seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, sebagai instrumen proxy war untuk menantang superioritas militer Israel (Byman, 2022).

Dengan demikian, kedua konflik menegaskan bahwa kekuatan non-konvensional dapat menjadi penyeimbang terhadap aktor negara dengan kapabilitas militer yang lebih unggul.

Selain aspek strategi, kedua konflik juga memiliki dimensi ideologis yang kuat. Perang Diponegoro dipicu oleh sentimen religius dan moralitas Islam Jawa, yang memberikan legitimasi ideologis kepada perjuangan rakyat dan memperkuat daya tahannya (Ricklefs, 2018). Demikian pula, konflik Iran-Israel dibingkai sebagai “perlawanan ideologis” di mana Iran memposisikan diri sebagai pembela umat Muslim dan menolak eksistensi Israel atas dasar agama dan moral politik. Dalam kedua konteks ini, ideologi berfungsi sebagai sumber legitimasi, mobilisasi massa, serta pembentuk identitas kolektif yang memperkuat daya tahan konflik meskipun menghadapi tekanan besar dari lawan.

Dampak konflik terhadap aspek sosial-ekonomi juga menunjukkan kesamaan historis. Perang Diponegoro melemahkan fondasi ekonomi Jawa, merusak sistem perdagangan, dan menimbulkan penderitaan sosial akibat blokade serta gangguan logistik (Carey, 2017). Hal ini serupa dengan dampak konflik Iran-Israel terhadap jalur perdagangan internasional mencerminkan bagaimana konflik berskala regional dapat merembet menjadi krisis ekonomi yang luas, sebagaimana dampak ekonomi yang dialami Jawa akibat perang berkepanjangan.

Dari sisi diplomasi, Perang Diponegoro memberi pelajaran berharga mengenai tipu daya dalam perundingan. Belanda menggunakan diplomasi untuk menjebak Pangeran Diponegoro dengan kedok perundingan damai yang berujung pada penangkapannya (Ricklefs, 2018). Refleksi ini relevan dengan diplomasi modern yang sering kali sarat agenda tersembunyi dari kekuatan besar dunia. Bagi Indonesia, pengalaman historis tersebut menjadi peringatan agar berhati-hati dalam menghadapi negosiasi internasional, khususnya dalam konflik global seperti Iran-Israel. Tipu daya diplomatik yang pernah digunakan Belanda dapat menjadi cermin agar Indonesia tidak mudah terjebak dalam kepentingan negara-negara besar, melainkan tetap menjaga kemandirian dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan strategi ketahanan nasional.

d. Prospek Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Peran Masa Depan

Kebijakan luar negeri Indonesia hingga saat ini tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif yang telah menjadi fondasi sejak awal kemerdekaan. Prinsip ini menegaskan kemandirian Indonesia dalam menentukan sikap tanpa terikat pada blok kekuatan besar mana pun, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam penyelesaian berbagai konflik global melalui jalur diplomasi damai (Sukma, 2020). Dalam konteks konflik di Timur Tengah, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan menolak tindakan agresif Israel yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional serta prinsip keadilan global (Kemlu RI, 2023). Selain dimensi politik, faktor ekonomi khususnya energi juga berperan penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ketergantungan terhadap pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah menjadikan stabilitas regional, terutama di sekitar Iran dan Israel, sebagai faktor strategis bagi ketahanan energi nasional (Basriza, 2022). Oleh karena itu, meskipun Indonesia tegas mendukung Palestina, sikap diplomatik yang diambil tetap berhati-hati agar tidak merugikan kepentingan dagang dan hubungan diplomatik dengan mitra strategis global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa.

Melihat dinamika global saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan strategi kebijakan luar negeri yang lebih adaptif dan antisipatif terhadap perkembangan konflik Iran-Israel. Prospek kebijakan luar negeri Indonesia ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mentransformasi tiga pilar utama prinsip bebas-aktif, kepentingan ekonomi-strategis, dan peran sebagai *middle power* menjadi instrumen kebijakan yang konkret dan efektif (Laksmiana, 2023). Dari sisi identitas internasional, Indonesia

berupaya menampilkan diri sebagai *middle power* yang menggabungkan idealisme normatif dengan kepentingan pragmatis. Posisi ini memungkinkan Indonesia memainkan peran sebagai mediator atau jembatan antara negara-negara besar dan negara berkembang, termasuk dalam isu konflik Iran–Israel (Acharya, 2020).

Dalam dimensi ekonomi, strategi ketahanan energi nasional menjadi prioritas penting. Ketergantungan Indonesia pada pasokan minyak dari Timur Tengah menciptakan kerentanan strategis yang harus diantisipasi melalui pendekatan hedging yang lebih canggih. Langkah ini dapat diwujudkan dengan memperluas kerja sama energi bersama negara-negara produsen di luar Timur Tengah seperti di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tengah (Aminuddin, 2023). Selain diversifikasi pasokan, investasi besar-besaran dalam transisi energi menuju sumber terbarukan juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam isu perubahan iklim dan energi berkelanjutan (IRENA, 2024). Dari sisi keamanan, Indonesia perlu memperkuat kerja sama pertahanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Melalui forum seperti *Indian Ocean Rim Association* (IORA) dan *Pacific Islands Forum*, Indonesia dapat berperan aktif dalam membangun *collective security mechanism* yang tidak bergantung pada kekuatan besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Langkah ini tetap sejalan dengan prinsip bebas-aktif, namun menambah dimensi strategis bagi perlindungan kepentingan nasional (Sebastian, 2022).

Selain dimensi politik dan keamanan, kapasitas diplomasi publik dan digital juga menjadi instrumen baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Penggunaan media sosial, platform multilateral digital, dan kolaborasi dengan *global influencers* dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan narasi perdamaian, toleransi, serta solusi diplomatik yang selaras dengan prinsip normatif Indonesia. Diplomasi publik ini juga bisa diperkuat melalui *soft power* seperti promosi budaya, pendidikan, dan nilai-nilai Islam moderat yang menjadi kekuatan unik Indonesia di mata dunia (Melissen & Wang, 2023). Program seperti pendirian *Indonesian Cultural Center*, pemberian beasiswa bagi pelajar dari negara konflik, serta pertukaran pemuda dapat memperluas pengaruh Indonesia tanpa harus mengandalkan *hard power* atau terjebak dalam polarisasi politik global.

Secara keseluruhan, prospek kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi konflik Iran–Israel perlu bersifat dinamis, adaptif, dan multidimensional. Indonesia tidak hanya perlu mempertahankan prinsip bebas-aktif dan komitmen terhadap Palestina, tetapi juga mengembangkan instrumen kebijakan baru yang sesuai dengan kompleksitas tantangan geopolitik abad ke-21. Dengan menggabungkan diplomasi preventif, diversifikasi strategis, transisi energi berkelanjutan, dan penguatan diplomasi digital, Indonesia memiliki peluang untuk mentransformasi perannya sebagai *middle power* menjadi kekuatan regional yang lebih berpengaruh. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian global sekaligus melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik akibat konflik Iran–Israel.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Konflik Iran–Israel telah bertransformasi dari konflik regional menjadi arena kontestasi geopolitik global yang berdampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional Indonesia. Berdasarkan analisis Discourse Network Analysis (DNA), konflik ini melibatkan kompleksitas aktor yang saling berkompetisi melalui tujuh konsep kunci: agresi militer, keamanan regional, peran aktor global, HAM, propaganda media, dampak ekonomi, dan ketidakstabilan kebijakan. Indonesia sebagai *middle power* dengan prinsip bebas-aktif

menghadapi dilema klasik dalam menyeimbangkan komitmen moral terhadap Palestina dengan kepentingan pragmatis mencakup ketahanan energi, stabilitas ekonomi, dan hubungan diplomatik dengan mitra strategis global.

Dampak konflik terhadap ketahanan nasional Indonesia bersifat multidimensional. Dari dimensi ekonomi, ketergantungan pada impor minyak Timur Tengah menciptakan kerentanan fiskal serius dengan subsidi energi mencapai Rp177,62 triliun (2024) dan diproyeksikan Rp203,4 triliun (2025). Potensi penutupan Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak pada inflasi, pelemahan rupiah, dan penurunan daya beli masyarakat. Dari dimensi hankam, ancaman terhadap keamanan maritim ALKI, peningkatan potensi terorisme dan radikalisme, serta tekanan geopolitik menuntut kesiapan operasional lebih baik meskipun masih menghadapi keterbatasan alutsista dan teknologi.

Perang Diponegoro (1825-1830) yang menjadi bagian sejarah perjuangan nasional dapat menjadi kerangka reflektif bagi Indonesia dalam merespons dinamika geopolitik global. Pengalaman Perang Diponegoro menunjukkan bahwa kekuatan ideologi, solidaritas sosial, dan strategi asimetris adalah kunci ketahanan bangsa di tengah ketimpangan kekuatan. Konflik Iran-Israel memperlihatkan pola serupa—perang asimetris berbasis ideologi dan kepentingan ekonomi yang menuntut kebijakan luar negeri dan ketahanan nasional yang adaptif. Kesamaan dalam strategi non-konvensional, legitimasi ideologis, dampak sosial-ekonomi, dan tipu daya diplomatik menegaskan relevansi pembelajaran sejarah dalam konteks modern. Pembelajaran ini menegaskan urgensi bagi Indonesia untuk membangun ketahanan nasional berbasis kemandirian energi, diplomasi cerdas, dan solidaritas domestik dalam menghadapi dampak konflik Iran-Israel.

Prospek kebijakan luar negeri Indonesia ke depan harus dinamis, adaptif, dan multidimensional dengan mentransformasi tiga pilar prinsip bebas-aktif, kepentingan ekonomi-strategis, dan peran *middle power* menjadi instrumen kebijakan konkret. Strategi mencakup: penguatan diplomasi preventif dan *track-two diplomacy*, diversifikasi kemitraan strategis melalui *hedging strategy*, peningkatan diplomasi digital dan *public diplomacy*, penguatan peran dalam arsitektur keamanan regional, serta persiapan skenario kontinjensi. Dengan kombinasi ini, Indonesia memiliki peluang mentransformasi perannya menjadi kekuatan regional yang lebih berpengaruh dalam penyelesaian konflik global sekaligus melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan lima langkah strategis:

- 1) Mempercepat diversifikasi sumber energi dengan memperluas kerja sama dengan negara produsen di luar Timur Tengah dan mengintensifkan investasi energi terbarukan, serta mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk mengurangi beban APBN tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat rentan.
- 2) Mengaktifkan jalur *track-two diplomacy* melibatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi dialog informal, memperkuat kapasitas diplomasi digital melalui task force khusus, dan mengoptimalkan peran di forum multilateral (ASEAN, OKI, G20, PBB) untuk membangun koalisi mendorong resolusi damai berbasis hukum internasional.
- 3) Meningkatkan kapasitas operasional TNI AL melalui modernisasi alutsista dan penguatan *maritime domain awareness*, serta memperkuat kerja sama pertahanan maritim di Indo-Pasifik dan koordinasi dengan BNPT untuk mengantisipasi ancaman terorisme dan radikalisme.

- 4) Memperkuat literasi publik mengenai kompleksitas geopolitik dan kepentingan nasional melalui pendidikan politik luar negeri, kampanye media, dan dialog publik untuk membangun pemahaman bersama bahwa kebijakan fleksibel Indonesia adalah strategi adaptif, bukan inkonsistensi.
- 5) Membangun Sistem Peringatan Dini terintegrasi untuk deteksi dini eskalasi konflik dan menyusun rencana kontijensi komprehensif mencakup diplomasi darurat, evakuasi WNI, stabilisasi pasar energi, dan koordinasi antar-kementerian dalam crisis management.

Implementasi rekomendasi ini memerlukan komitmen politik kuat, alokasi anggaran memadai, dan koordinasi lintas sektor solid. Pembelajaran dari Perang Diponegoro menegaskan bahwa ketahanan nasional kokoh dibangun atas kemandirian strategis, diplomasi cerdas, dan solidaritas domestik sehingga menjadi nilai yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan geopolitik abad ke-21.

Daftar Pustaka

- Abdurohman & Resosudarmo, B. (2012). *Dampak Ekonomi Besar dari Paket Stimulus Fiskal 2009 di Indonesia*. Makalah disajikan pada Konferensi Internasional Asosiasi Ilmu Regional Indonesia (IRSA) ke-11.
- Acharya, A. (2020) *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ali, A., Kousar S., & Ahmed, M. (2025) 'Maritime Security and the Indo-Pacific: Middle Powers' Strategic Dilemmas', *Journal of Asian Security and International Affairs*, 12(1), pp. 45–67.
- Ali, Z., Kousar, F., & Ahmed, S. (2025). The Israel-Iran Conflict: Shaping New Regional Dynamics in the Middle East. *Journal Of Social Science and Knowledge Horizons*, 1(1), 29–40.
- Arunatilake, N. (2006). Partisipasi pendidikan di Sri Lanka: Mengapa semua tidak ada di sekolah. *Jurnal Internasional Penelitian Pendidikan*, 45 (3): 137–152.
- Barro, RJ, dan Lee JW. (2001). Data internasional tentang pembaruan dan implikasi pencapaian pendidikan. *Oxford Economic Papers* 53 (3): 541–63.
- Basriza, A. (2022) 'Energy Security Challenges for Indonesia in the Middle East Geopolitical Dynamics', *Indonesian Journal of International Studies*, 9(2), pp. 110–128.
- BNPT. (2022). Laporan Ancaman Terorisme dan Radikalisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Breen, R., Luijckx, R., Müller, W. & Pollak, R. (2009). Ketidakmerataan yang tidak persisten dalam pencapaian pendidikan: bukti dari delapan negara Eropa. *American Journal of Sociology* 114: 1475–521.
- Byman, D. (2022) *Spreading Hate: The Global Rise of White Supremacist Terrorism*. Oxford University Press.
- Carey, P. (2017) *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855*. Leiden: KITLV Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

- Hakim, F. N., Putri, L. D. M., & Gustianti, N. A. (2023). Dampak Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel Dan Negara-Negara Arab Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Timur Tengah. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 305-318.
- Haryanto, A. (2010) *Meningkatkan kualitas layanan Kantor Pendidikan Kabupaten (DEO) di Indonesia sistem pendidikan desentralisasi*. Tesis PhD yang tidak diterbitkan. Sekolah Manajemen, Sekolah Tinggi Bisnis, Universitas RMIT. Tersedia dari <https://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:9481/Haryanto.pdf> [Diakses 5 Juni 2015]
- <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/ketika-pajak-bahan-bakar-menjadi-kunci-meretas-ketergantungan-bbm-bersubsidi>
- <https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-israels-open-warfare-after-decades-shadow-war-2024-04-14/>
- <https://www.straitstimes.com/world/middle-east/iran-and-israels-open-warfare-after-decades-of-shadow-war>
- Indrawan, J., & Yuliandri, P. (2025). Konflik Israel-Iran sebagai Pembuka Pecahnya Perang Dunia III: Dampaknya bagi Indonesia. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 17(2), 125-135.
- Kementerian ESDM. (2023). *Outlook Energi Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Koloay, J. S., Cecep, C., & Miknamara, M. (2024). Pengaruh Konflik Israel-Iran terhadap Keamanan Kawasan Regional dan Global. *Syntax Idea*, 6(9), 6079-6086.
- Lituhayu, B. N. A. L., Nayla, N. M., & Park, H. K. (2024). Analysis of the Iran-Israel War Conflict on Economic Implications in Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(2), 149-161.
- Maulana Prasetya, D., Ladiqi, S., & Salleh, M. A. (2025). Back to the past: The roots of Indonesian middlepowermanship. *Asian Journal of Comparative Politics*, 10(2), 97-112.
- Mohammad, I. (2007) *Standar layanan minimum sebagai upaya peningkatan pelayanan publik: pengalaman Indonesia*. Dipresentasikan dalam Seminar Eropa tentang Kualitas Layanan di Sektor Publik: Pendekatan Berbasis Hasil. Teheran: 18-22 November 2007. Tersedia dari <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/EROPA/UNPAN029263.pdf> [Diakses 5 Juni 2015]
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 12(2), 170-181.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *bmj*, 372.
- Paramita, K. (2017). Peperangan dan serangan.
- Parsi, T. (2007). Iran and Israel: the avoidable war. *Middle East Policy*, 14(3).
- Putri, A. Y., Syahrir, S. A., Hikmah, N., & GH, N. H. (2024). Analisis Harga Saham PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk Akibat Geopolitik Antara Iran dan Israel. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 7(1), 1-11.
- Rahmatulummah, A., & Resky, S. A. (2024). Eskalasi konflik Iran-Israel di Damaskus: Implikasi terhadap stabilitas keamanan regional dan global. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1), 49-68.

- Roomi, F. (2023). The Iran-Israel conflict: An ultra-ideological explanation. *Middle East Policy*, 30(2), 94-109.
- Roshandel, J., & Lean, N. C. (2011). Iran, Israel, and the United States.
- Rosny, F., & Samad, M. Y. (2024). Jurnal Lemhannas RI (JLRI). *Jurnal Lemhannas RI (JLRI)*, 12(2).
- Sukma, R. (2020). Indonesia's Response to the Changing Geopolitical Landscape in the Middle East. *The Indonesian Quarterly*, 48(1), 23-38.
- Van Dijk, T. A. (2014). Discourse, cognition, society. *The discourse studies reader: Main currents in theory and analysis*, 388.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. *The handbook of discourse analysis*, 466-485.
- Zawacki-Richter, O., Marin, V., Bond, M., & Gouverneur, F. (2020). Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung–Ausgewählte Ergebnisse eines Systematic Review. *Digitale Bildung und Künstliche Intelligenz in Deutschland: Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsagenda*, 501-517.